

Aktivist HAM Gugat Presiden Nigeria karena Blokir Twitter

ABUJA(IM) - Seorang aktivis hak asasi manusia di Nigeria mengajukan gugatan atas presiden negara itu karena pemblokiran Twitter.

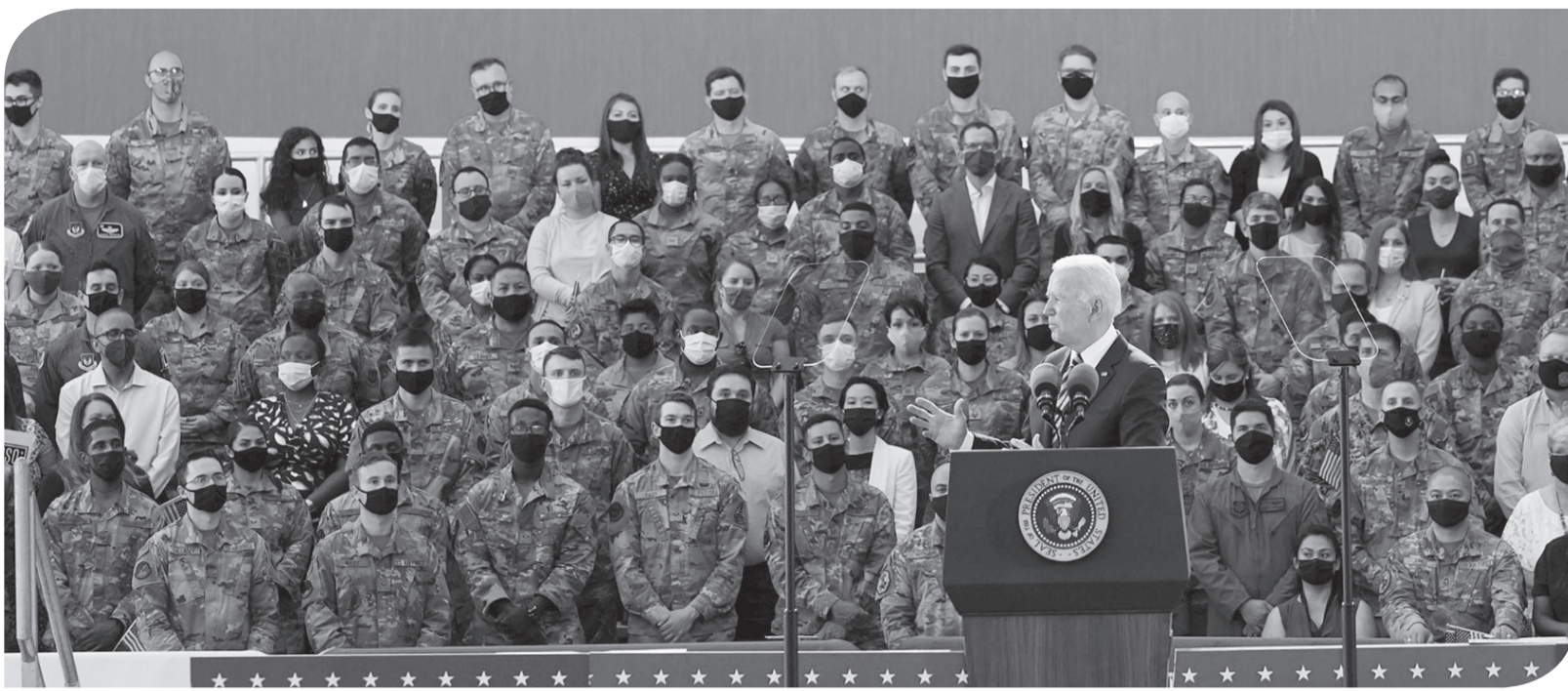
Lewat sebuah pernyataan, Femi Falana mengatakan dia menggugat Muhammad Buhari di pengadilan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) atas larangan penggunaan Twitter bagi berbagai organisasi non-pemerintah. Selain itu, larangan tersebut juga berlaku bagi 176 warga Nigeria.

Falana menggarisbawahi bahwa larangan tersebut mengancam kebebasan ber-
 ekspresi dan hak untuk mengakses informasi.

Pada Sabtu, Nigeria memblokir Twitter setelah situs microblogging itu menghapus cuitan-cuitan Buhari di mana dia diduga mengancam kelompok separatis.

Falana menggarisbawahi bahwa larangan tersebut mengancam kebebasan ber-
 ekspresi dan hak untuk mengakses informasi.

Pada Sabtu, Nigeria memblokir Twitter setelah situs microblogging itu menghapus cuitan-cuitan Buhari di mana dia diduga mengancam kelompok separatis. ● **gul**



SAMBUTAN PRESIDEN JOE BIDEN JELANG KTT G7

Presiden AS Joe Biden memberikan sambutan di hadapan anggota Angkatan Udara AS dan keluarga mereka yang ditugaskan di RAF Mildenhall, menjelang KTT G7, dekat Mildenhall, Inggris, Rabu (9/6).

350 Ribu Orang di Tigray Ethiopia Alami Kelaparan

Menurut catatan kelaparan terjadi 2 kali dalam dekade terakhir, di Somalia dan Sudan.

ADDIS ABABA(IM)- Sebuah analisis yang tidak dipublikasikan badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan kelompok-kelompok bantuan memperkirakan sekitar 350.000 orang di wilayah Tigray berada dalam kondisi kelaparan. Hal ini menurut dokumen internal PBB yang dilihat oleh Reuters pada Kamis (10/6). Tigray adalah wilayah yang dilanda konflik di Ethiopia.

non-PBB, kelaparan telah dinyatakan terjadi dua kali dalam dekade terakhir. Yang pertama terjadi di Somalia pada 2011 dan di Sudan Selatan pada 2017, menurut IPC.

Badan-badan PBB, kelompok bantuan, pemerintah dan pihak terkait lainnya menggunakan IPC untuk bekerja sama menentukan situasi. "Mengenai risiko kelaparan, tercatat bahwa angka analisis IPC yang tidak dipublikasikan sedang diperdebatkan oleh pemerintah Ethiopia, terutama sekitar 350.000 orang di seluruh Tigray yang diyakini berada dalam kondisi kelaparan IPC 5," tulis dokumen itu.

Ia juga mengatakan analisis itu telah menemukan bahwa

jutaan orang lebih di seluruh Tigray membutuhkan dukungan pangan dan pertanian. Dukungan mata pencaharian mendesak untuk mencegah penurunan lebih lanjut menuju kelaparan.

Seorang diplomat senior Ethiopia di New York, berbicara dengan syarat anonim, membenarkan bahwa pemerintah membantah analisis tersebut. Diplomat itu mempertanyakan metode survei dan menuduh IPC kurang transparan dan tidak cukup konsultasi dengan otoritas terkait.

Pertempuran di Tigray pecah pada November antara pasukan pemerintah dan mantan partai yang berkuasa di kawasan itu, Front Pembebasan Rakyat Tigray. Pasukan dari negara tetangga Eritrea juga telah memasuki konflik untuk mendukung pemerintah Ethiopia. Kekeerasan di Tigray telah menewaskan ribuan orang dan memaksa ratusan ribu orang

meninggalkan rumah mereka di wilayah pegunungan berpenduduk lebih dari 5 juta jiwa itu. Sementara itu, lebih dari 90 orang tewas ditembak aparat keamanan dalam aksi unjuk rasa menolak lahan pertanian mereka direlokasi di Etiopia, pekan lalu.

"Sejauh ini kami telah mengumpulkan 33 daftar pemertuan yang tewas oleh pasukan keamanan bersenjata termasuk polisi dan tentara, tapi saya yakin daftar tersebut akan terus bertambah," kata

Mulatu Gemechu wakil ketua oposisi Oromo Federalis Kongres, Rabu (10/9).

Kerusuhan berkobar di Oromiya beberapa bulan yang lalu sejak ada rencana relokasi lahan pertanian di sekitar ibukota. Pihak berwenang membatalkan rencana tersebut pada bulan Januari lalu, tapi protes kembali terjadi sejak penahanan terhadap demonstran oposisi pemerintah.

Pada akhir pekan kemarin para demonstran meneriakkan slogan anti-pemerintah dan mengibarkan bendera pembangkangan. Beberapa demonstran juga menuntut dibebaskannya politisi oposisi yang dipenjara pemerintah.

Mulatu mengatakan, penembakan terjadi setidaknya di 10 kota diseluruh Oromiya. Termasuk daerah-daerah tempat unjuk rasa dilakukan seperti di Ambo, Dembi Dolo dan Nekemt.

"Dua puluh enam orang terluka, sementara beberapa orang telah ditahan," kata Mulatu.

Para pejabat negara Etiopia tidak bersedia memberi komentar. Kantor berita milik pemerintah mengatakan demonstrasi tersebut sebagai protes ilegal yang dilakukan oleh pasukan anti-perdamaian. Kantor berita itu menyatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. ● **tom**

Pesawat Militer Myanmar Jatuh, 12 Orang Tewas

MANDALAY (IM)- Sebuah pesawat militer Myanmar jatuh di wilayah Mandalay akibat cuaca buruk pada Kamis (10/6) pagi. Militer setempat telah mengkonfirmasi insiden ini.

Mayor Jenderal Zaw Min Tun dari Tim Informasi Dewan Tata Negara mengatakan kepada Xinhua bahwa pesawat

itu membawa 14 orang. Menurutny, pesawat melakukan perjalanan dari Ibu Kota Myanmar, Naypyitaw ke Pyin Oo Lwin. Pesawat jatuh di Pyin Oo Lwin wilayah Mandalay sekitar pukul 08.00 waktu setempat.

Dia mengatakan jumlah korban belum diketahui karena

operasi penyelamatan sedang dilakukan.

Namun, halaman media sosial Departemen Pemadam Kebakaran Wilayah Mandalay mengatakan 12 orang di dalamnya tewas.

Dua orang telah diselamatkan dan dikirim ke rumah sakit militer untuk perawatan. ● **ans**

Biden Cabut Perintah Trump Larang Unduh WeChat dan TikTok

WASHINGTON (IM)-- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menarik serangkaian perintah eksekutif era Donald Trump yang berusaha melarang unduhan baru WeChat dan TikTok, Rabu (9/6). Dia memerintahkan Departemen Perdagangan meninjau kembali masalah keamanan yang ditimbulkan oleh aplikasi tersebut.

Perintah eksekutif ini mencabut perintah WeChat dan TikTok yang dikeluarkan Trump pada Agustus. Pemerintahan Trump berusaha memblokir pengguna baru mengunduh aplikasi asal China tersebut. Namun, penga-

dilan menolak perintah itu dan aturan ini tidak pernah berlaku.

Meski pengadilan telah memblokir perintah Trump, pejabat Gedung Putih menyatakan, tinjauan keamanan nasional AS terpisah dari TikTok yang diluncurkan pada akhir 2019 tetap aktif dan berkelanjutan. Gedung Putih sangat prihatin dengan risiko data pengguna TikTok.

Mengatasi masalah itu, perintah Biden mengarahkan Departemen Perdagangan untuk memantau aplikasi perangkat lunak seperti TikTok yang dapat memengaruhi keamanan nasional AS. Dia pun membuat rekomendasi dalam waktu 120 hari untuk melindungi data AS yang diperoleh atau dapat diakses perusahaan yang dikendalikan oleh musuh asing. ● **gul**

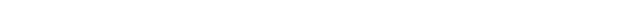
nasional AS. Dia pun membuat rekomendasi dalam waktu 120 hari untuk melindungi data AS yang diperoleh atau dapat diakses perusahaan yang dikendalikan oleh musuh asing. ● **gul**

Menghadapi beberapa dakwaan, antara lain tuduh melanggar undang-undang bencana alam, kepemilikan walkie-talkie ilegal, dan melanggar pembatasan Covid-19. Pada Maret lalu, dia pun dituduh melakukan korupsi. "Aung San Suu Kyi melakukan korupsi dan (pihak berwenang) bersiap untuk menuntutnya sesuai dengan undang-undang antikorupsi," kata lembaga penyiaran militer Myanmar, Myawady, pada 17 Maret lalu.

Itu bukan pertama kalinya tuduhan korupsi diajukan terhadap Suu Kyi. Pada bulan yang sama seorang juru bicara militer mengatakan seorang menteri utama yang kini ditahan telah mengakui memberi Suu Kyi 600 ribu dolar AS dan lebih dari 10 kilogram emas batangan.

Pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw, telah membantah

IND/ANTARA



FESTIVAL FILM BERLINALE SUMMER DI BERLIN
 Para tamu menunggu pembukaan festival film Berlinale Summer Special di Museum Island, di Berlin, Jerman, Rabu (9/6).

Aung San Suu Kyi Kembali Didakwa Lakukan Korupsi

YANGON (IM)-- Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi telah dijera dakwaan baru terkait kasus korupsi. Sejak digulingkan militer, Suu Kyi menghadapi sedikitnya tujuh dakwaan.

Global New Light of Myanmar dalam laporannya pada Kamis (10/6) menyebut, Komisi Anti-Korupsi Myanmar menemukan bukti bahwa Suu Kyi telah melakukan rasuah menggunakan pangkat atau jabatannya. "Jadi dia dijera dengan Undang-Undang Anti-Korupsi pasal 55," katanya.

Menghadapi beberapa dakwaan, antara lain tuduh melanggar undang-undang bencana alam, kepemilikan walkie-talkie ilegal, dan melanggar pembatasan Covid-19. Pada Maret lalu, dia pun dituduh melakukan korupsi. "Aung San Suu Kyi melakukan korupsi dan (pihak berwenang) bersiap untuk menuntutnya sesuai dengan undang-undang antikorupsi," kata lembaga penyiaran militer Myanmar, Myawady, pada 17 Maret lalu.

Itu bukan pertama kalinya tuduhan korupsi diajukan terhadap Suu Kyi. Pada bulan yang sama seorang juru bicara militer mengatakan seorang menteri utama yang kini ditahan telah mengakui memberi Suu Kyi 600 ribu dolar AS dan lebih dari 10 kilogram emas batangan.

Pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw, telah membantah

tuduhan tersebut. Khin menyebut tuduhan itu tak logis dan tak berdasar. "Aung San Suu Kyi mungkin memiliki kecurangan, tapi suap dan korupsi bukanlah sifatnya," katanya seraya menambahkan bahwa kebanyakan orang di Myanmar tidak akan mempercayai tuduhan tersebut.

Pada 1 Februari lalu, militer Myanmar tidak akan mempercayai tuduhan tersebut. Mereka menangkap Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior partai National League for Democracy (NLD).

Kudeta dan penangkapan sejumlah tokoh itu merupakan respons militer Myanmar atas dugaan kecurangan pemilu pada November tahun lalu. Dalam pemilu itu, NLD pimpinan Suu Kyi menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi parlemen yang tersedia. Itu merupakan kemenangan kedua NLD sejak berakhirnya pemerintahan militer di sana pada 2011.

Setelah kudeta, hampir seluruh wilayah di Myanmar diguncang gelombang demonstrasi. Massa menentang kudeta dan menyerukan agar para pemimpin sipil yang ditangkap dibebaskan. Namun militer Myanmar merespons aksi tersebut secara represif dan brutal. Lebih dari 800 orang dilaporkan telah tewas di tangan militer. ● **gul**

PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) juncto Pasal 125 ayat (7) dan (8) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUP") dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan ("PP27/98"), maka bersama ini Direksi PT BUKIT PERSADA Indonesia ("BPI"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta selaku Pihak Yang Akan Mengambilalih; dan Direksi PT Bukit Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta selaku Pihak Yang Akan Diambilalih, bersama-sama mengumumkan rencana pengambilalihan secara langsung oleh "BPI" atas saham-saham sebanyak-banyaknya 79% (tujuh puluh sembilan persen) dan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, milik HERMANSYAH, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Taman Agave Blok H.4/5, Rukun Tatanaga 006, Rukun warga 014, Kelurahan Jaka Seta, Kecamatan Bekasi Selatan, ("Pengambilalihan").

Apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan atas rencana Pengambilalihan ini, mohon menyampaikan secara tertulis berikut alasan-alasan dan bukti-bukti pendukung yang sah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini kepada:

PT BUKIT PERSADA
 Taman Modern Blok R.2 No. 18
 Jakarta Timur
 U.p.: Direksi

Demikianlah pengumuman ini disampaikan untuk diketahui khalayak ramai.
 Jakarta, 11 Juni 2021

Direksi PT Bukit Persada Indonesia Direksi PT Bukit Persada



BANJIR DI MUMBAI - INDIA

Orang-orang melintasi rel kereta api yang tergenang air di sebelah kereta penumpang yang diparkir selama hujan lebat di Mumbai, India, Rabu (9/6/2021).

IND/ANTARA

PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) juncto Pasal 125 ayat (7) dan (8) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUP") dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan ("PP27/98"), maka bersama ini Direksi PT Hillcon Equity Management ("HEM"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta selaku Pihak Yang Akan Mengambilalih; dan Direksi PT Hillcon ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta selaku Pihak Yang Akan Diambilalih, bersama-sama mengumumkan rencana pengambilalihan secara langsung oleh HEM atas saham-saham sebanyak-banyaknya 81% (delapan puluh satu persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, milik HERSAN, bertempat tinggal di Jalan Kintamani II Nomor 10, Rukun Teranga 003, Rukun warga 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ("Pengambilalihan").

Setelah pengambilalihan menjadi efektif, karyawan tetap akan menjadi karyawan Perseroan. Apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan atas rencana Pengambilalihan ini, mohon menyampaikan secara tertulis berikut alasan-alasan dan bukti-bukti pendukung yang sah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini kepada:

PT HILLCON
 Taman Modern Blok R2 nomor 19
 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung
 Jakarta Timur
 U.p.: Direksi

Demikianlah pengumuman ini disampaikan untuk diketahui khalayak ramai.
 Jakarta, 11 Juni 2021

Direksi PT Hillcon Equity Management Direksi PT Hillcon